

Judul : Petani Temui BAM DPR Kekacauan Data Bikin Tanah Warga Hilang
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Petani Temui BAM DPR Kekacauan Data Bikin Tanah Warga Hilang

ANGGOTA Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Harris Turino menyoroti konflik agraria yang menimpa masyarakat dan Suku Anak Dalam di Jambi. Sengketa lahan warga dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi telah berlangsung bertahun-tahun.

Harris menegaskan, penyelesaian persoalan ini memerlukan langkah terpadu lintas kementerian agar keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak. Negara tidak boleh abai terhadap penderitaan warga yang kehilangan akses terhadap tanah yang telah mereka garap turun-temurun.

"Kasus seperti ini sulit diselesaikan karena kedua pihak sama-sama punya dasar hukum. Tapi negara tetap harus hadir mencari jalan tengah," ujar Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR dengan Masyarakat Suku Anak Dalam dan Petani Kabupaten Batang Hari serta Muaro Jambi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dia menjelaskan, tumpang tindih lahan sering terjadi akibat lemahnya koordinasi antar instansi, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Akibat kekacauan data, banyak masyarakat adat dan petani kecil kehilangan lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.

"Banyak warga merasa memiliki hak garap sejak lama, tapi perusahaan juga pegang izin resmi. Inilah yang membuat situasi jadi rumit," sambung anggota Fraksi PDIP itu.

Harris menilai, BAM DPR perlu mendorong rapat lintas kementerian untuk men-

cari solusi permanen, termasuk membuka kembali data HGU dan melakukan pemetaan ulang wilayah konflik. Penyelesaian agraria tidak boleh berhenti pada mediasi administratif, harus menjamin keadilan sosial bagi masyarakat adat.

"Kalau tanah terus hilang, kita sedang mencabut akar kehidupan mereka. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan generasi muda di desa," ingatnya.

Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan menambahkan, penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara objektif dan adil dengan melibatkan semua pihak. Setiap pihak memiliki pandangan subjektif yang perlu dipertemukan agar dihasilkan keputusan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

"Nah, nanti ketika semua pandangan itu dipertemukan, barulah bisa ditemukan kebenaran objektifnya," ujar Aher.

Legislator dari Fraksi PKS itu menyebut, kasus di Jambi merupakan potret umum dari ribuan konflik agraria di Indonesia. Akar masalahnya sama, yakni tumpang tindih lahan akibat pemberian HGU yang merambah kawasan masyarakat. Akibatnya, masyarakat dirugikan karena lahan tempat mereka menggantungkan hidup justru diserobot.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan besar dengan masyarakat kecil yang membuat warga sulit mempertahankan haknya. Menurutnya, negara harus memastikan keadilan tidak hanya bagi pemilik modal, tetapi juga bagi rakyat kecil yang hidup dari tanah.

Pasalnya, kata dia, seringkali ada kelalaian di masyarakat, tapi tanahnya tidak diurus pada asalnya. Ini jadi peluang bagi para pemilik HGU untuk menghapus kepemilikan masyarakat. ■ PYB